

PERUBAHAN SOSIAL DI BANDUNG 1810 – 1906

A. Sobana Hardjasaputra
Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran
Jatinangor Bandung 40600

ABSTRAK

Kota Bandung didirikan oleh R.A. Wiranatakusumah II, Bupati Bandung ke-6 (1794 – 1829) dengan pola kota tradisional. Kota itu didirikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Hasil penelitian sampai pada simpulan, bahwa tanggal 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Hal itu berarti tanggal tersebut merupakan titik tolak perubahan sosial di kota itu pada abad ke-19. Perubahan sosial di kota Bandung periode 1810 – 1906 merupakan hasil interaksi banyak faktor. Faktor-faktor itu menyangkut tiga aspek, yaitu kekuasaan, fisik kota, dan sosial ekonomi. Aspek kekuasaan berasal dari bupati (pihak pertama) dan gubernur jenderal/residen (pihak kedua). Kedua kekuasaan itu berpengaruh terhadap perubahan fisik kota dan sosial ekonomi. Hubungan pengaruh di antara ketiga aspek itu merupakan pola dasar perubahan. Perubahan berlangsung dalam tiga tahap, masing-masing dilandasi oleh fungsi kota. **Pertama**, sebagai ibukota kabupaten (1810-1864). **Kedua**, sebagai ibukota keresidenan, merangkap fungsi pertama (1864-1884). **Ketiga**, sebagai pusat transportasi kereta api "Jalur Barat", merangkap fungsi pertama dan kedua (1884-1906). Perubahan pada tahap pertama berlangsung lambat. Akan tetapi, pada tahap kedua perubahan berlangsung relatif cepat dan pada tahap ketiga, perubahan berlangsung makin cepat. Faktor penting pendorong percepatan perubahan pada tahap ketiga adalah transportasi kereta api (faktor teknologi) dan pengusaha swasta asing serta lembaga sosial yang turut berperan penting dalam pembangunan kota. Dapat disimpulkan, bahwa perubahan sosial di kota Bandung tahun 1810 – 1906 bergerak secara unilinear, dari kehidupan tradisional berkembang ke arah kehidupan modern.

Kata kunci : Bandung : perubahan sosial/ sejarah kota

SOCIAL CHANGE IN BANDUNG 1810 – 1906

ABSTRACT

Bandung city was founded by R.A. Wiranatakusumah II, the sixth regent of Bandung (1794 – 1829). It was originally a traditional city that was established as the center of the governmental agency. The result of the study concluded that 25 September 1810 is the birth of the city. It means, the date is considered as

the starting point of social changes of the city in the nineteenth century. The social changes in Bandung in 1810 – 1906 were by due to the interaction of many factors. These factors involved three aspects : authority, city physic, and social economy. The first authority was held by both *bupati* (regent) and governor general/resident. Both authorities influenced the change process of the physic of the city and its sosial economy. So, the interaction of one aspect with the others is the basic pattern of the changes. The process of the changes lasted in three phases. Each was based on the city function. First, as the capital of the regency (1810 – 1864). The second, as the capital of the residency as well as the first function (1864 – 1884), and third as the center of the train transportation of "West Line", as well as playing the role of the first and the second functions (1884 – 1906). The changes of the first phase was slow, but it was faster on the second phase and fastest on the last phase. The main factors that supported the speed of the third phase were the train tranportation (technological factor), and the foreign businessmen as well as the social institution who took the important role in developing city. It is concluded that the social change of Bandung city from 1810 to 1906 had an unilinear character, that is from traditional condition to the modern condition.

Keywords : Bandung : Social change/A History of city

PENDAHULUAN

Permasalahan

Perubahan sosial di kota Bandung periode 1810 – 1906 menarik dan penting untuk dikaji karena beberapa alasan. **Pertama**, masalah itu belum ada yang mem-bahas secara khusus, mendalam, dan menyeluruh. Tulisan-tulisan tentang sejarah Bandung abad ke-19 yang telah ada, pada umumnya berupa penggalan-penggalan yang lebih menonjolkan aktivitas/peranan orang-orang Belanda/Eropa di Bandung, sedangkan aktivitas/peranan orang pribumi belum banyak terungkap. **Kedua**, dalam periode tersebut kota Bandung memiliki berbagai fungsi yang menyebabkan terjadinya perubahan. Fungsi yang menonjol adalah sebagai ibukota kabupaten (1810 – 1864); sebagai ibukota keresidenan merangkap fungsi pertama (1864 – 1884), termasuk sebagai pusat pendidikan pribumi di Jawa Barat (sejak pertengahan tahun 1866); sebagai pusat transportasi kereta api "Jalur Barat" (1884 – 1906), merangkap fungsi-fungsi yang telah disebutkan, kemudian menjadi *gemeente* (kota ber-pemerintahan otonom, awal tahun 1906).

Dalam membahas perubahan sosial di Bandung pada periode tersebut, ada beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji/dijelaskan. **Pertama**, darimana asal atau sumber perubahan itu? Apakah berasal dari dalam (pihak masyarakat pribumi yang diwakili oleh bupati) atau berasal dari luar (pihak kolonial yang diwakili oleh gubernur jenderal dan/atau residen)? Atau berasal dari kedua belah

pihak? **Kedua**, aspek apa yang pertama-tama mengalami perubahan? **Ketiga**, kondisi awal bagaimana dan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perubahan lebih luas, atau menghambat perubahan? **Keempat**, bagaimana dan seberapa jauh pengaruh kekuasaan gubernur jenderal dan residen (pihak penjajah) terhadap bupati (pihak terjajah)? Hal itu perlu dijelaskan, karena dalam lingkup pemerintahan dan kehidupan masyarakat pribumi, kekuasaan/otoritas bupati sangat besar/kuat. **Kelima**, bagaimana dan seberapa jauh pengaruh kekuasaan terhadap aspek-aspek yang berubah? **Keenam**, bagaimana sifat dan arah perubahan itu? Proses perubahan sosial mungkin berlangsung lambat pada kurun waktu tertentu, tetapi menjadi cepat dalam kurun waktu lain.

Permasalahan-permasalahan tersebut dibahas berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, baik sumber primer (arsip/dokumen) maupun sekunder (buku dan artikel/berita dalam majalah dan surat kabar). Di antara sumber-sumber berupa buku, ada sejumlah buku yang ditulis oleh pelaku sejarah dan orang-orang yang mengalami atau menyaksikan sebagian peristiwa yang terjadi pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Dari segi bahasa yang digunakan, sumber-sumber tersebut terdiri atas sumber asing (sebagian besar berbahasa Belanda, sebagian kecil berbahasa Inggris) dan sumber pribumi berbahasa nasional (Indonesia) dan daerah (Sunda).

Ruang Lingkup Kajian dan Tujuan Penelitian

Secara garis besar, perubahan sosial di Bandung pada periode 1810-1906 mencakup aspek fisik kota dan aspek sosial ekonomi. Sejalan dengan alasan pertama pemilihan topik disertai, pembahasan aspek sosial ekonomi terutama ditekankan pada permasalahan dalam kehidupan masyarakat pribumi.

Dalam menguraikan perubahan aspek-aspek tersebut, dibahas pula pengaruh kekuasaan terhadap perubahan. Pada satu sisi, membahas pengaruh kekuasaan pemerintah kolonial, khususnya kekuasaan gubernur jenderal dan/atau residen terhadap kedudukan/kekuasaan bupati. Pada sisi lain, membahas pengaruh kekuasaan gubernur jenderal dan/atau residen pada satu pihak, dan pengaruh kekuasaan bupati pada pihak lain, terhadap perubahan fisik kota dan sosial ekonomi. Dibahas pula interaksi perubahan fisik kota dengan perubahan sosial ekonomi, serta faktor-faktor yang turut mempengaruhi perubahan.

Tahun 1810 dijadikan titik tolak kajian mengacu pada tahun berdirinya kota Bandung. Tahun 1906 dipilih sebagai batas akhir penelitian dengan mengacu pada momentum pembentukan Gemeente Bandung (1 April 1906). Dengan momentum itu kota Bandung menjadi kota berpemerintahan otonom.

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara deskriptif-analisis hal-hal yang dipertanyakan pada sub Permasalahan. Dalam tujuan khusus itu terkandung tujuan umum. **Pertama**, untuk melengkapi tulisan-tulisan tentang sejarah kota Bandung yang telah ada, sekaligus memperkaya khasanah sejarah Jawa Barat khususnya dan sejarah nasional umumnya. **Kedua**, kajian mengenai

perubahan sosial dalam disertasi diharapkan memiliki manfaat sebagai salah satu bahan acuan, khususnya bagi Pemerintah Kota Bandung, dalam menghadapi perubahan yang terus berlangsung, berikut dampaknya, karena perkembangan kota Bandung sekarang adalah kesinambungan dari perkembangan kota itu pada masa-masa sebelumnya.

Metode Penelitian dan Pendekatan

Prosedur penelitian dilakukan sesuai dengan metode sejarah, dipandu oleh kerangka pemikiran teoretis. Untuk memperkuat eksplanasi historis mengenai kausalitas dalam proses perubahan, digunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, politik, dan ekonomi. Teori-teori dalam ilmu-ilmu tersebut memiliki daya penjelas untuk mencari kondisi-kondisi kausal dalam suatu fenomena sejarah, dan dapat memperkuat analisis terhadapnya. Pendekatan dari ilmu-ilmu tersebut, dilandasi pula oleh metodologi strukturalis yang memusatkan perhatian terhadap individu dan/atau kelompok sosial tertentu sebagai faktor penyebab perubahan.

Kerangka Pemikiran Teoretis

Dalam pengertian paling sederhana, perubahan berkaitan dengan faktor-faktor sebelum dan sesudah. Oleh karena itu, dalam mem-bicarakan masalah perubahan, variabel waktu perlu diperhatikan. Namun jangka waktu yang terlalu pendek, kiranya sulit untuk memahami proses, sifat, dan arah perubahan. Atas dasar itu, studi ini memilih kurun waktu cukup panjang, hampir satu abad, yakni antara akhir tahun 1810 sampai dengan awal tahun 1906.

Perubahan sosial di Bandung pada periode tersebut, perlu dikaji secara komprehensif melalui aspek-aspek yang berubah. Dengan demikian akan diperoleh pemahaman yang komprehensif pula, karena tidak ada perubahan sosial yang berdiri sendiri. Perubahan dalam satu aspek biasanya diikuti oleh atau sejalan dengan perubahan-perubahan aspek lain yang berhubungan.

Perubahan sosial dapat dikatakan dikehendaki atau diharapkan (*intended change*) apabila bersumber pada perilaku individu-individu berdasarkan kehendak atau tujuan tertentu (Etzioni and Eva Etzioni, eds., 1964 : 358). Di Bandung hal itu memang terjadi. Berdirinya kota Bandung adalah kehendak Bupati R.A. Wiranatakusumah II (1794 – 1829) dan diharapkan oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808 – 1811). Perubahan fungsi kota Bandung menjadi ibukota keresidenan (sejak pertengahan tahun 1864) adalah kehendak residen Priangan, atas persetujuan gubernur jenderal Hindia Belanda, dan kota Bandung menjadi pusat transportasi kereta api "Jalur Barat" (sejak pertengahan tahun 1884) adalah keputusan gubernur jenderal. Demikian pula pembentukan Gemeente Bandung adalah kehendak gubernur jenderal yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Eropa di kota itu.

Sifat¹⁾ dan efektivitas pengaruh kekuasaan pejabat-pejabat tersebut, berhubungan pula dengan fungsi kota, khususnya fungsi administratif. Fungsi kota dalam bidang sosial ekonomi pun pada dasarnya terjadi akibat pengaruh kekuasaan dan perkembangan fungsi administratif kota. Fungsi kota dimaksud adalah pertama, sebagai ibukota kabupaten (1810 – 1864), kedua, sebagai ibukota keresidenan merangkap fungsi pertama (1864 – 1884), ketiga, sebagai pusat transportasi kereta api “Jalur Barat”, merangkap fungsi pertama dan kedua (1884 - 1906).

Efektivitas pengaruh kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi kota, khususnya fungsi administratif, menyebabkan perubahan fisik kota dan sosial ekonomi. Perubahan kedua aspek yang disebut terakhir berpengaruh secara timbal-balik. Perubahan fisik kota dan sosial ekonomi pada gilirannya berpengaruh pula terhadap kekuasaan, sehingga timbul kebijakan mengenai perubahan selanjutnya. Hal tersebut mengandung arti, bahwa proses perubahan fisik kota dan sosial ekonomi berlangsung lambat atau cepat, banyak tergantung pada sifat dan efektivitas pengaruh kekuasaan serta fungsi kota dan perkembangannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perubahan pada periode 1864 – 1884 akan lebih cepat dari perubahan pada periode 1810 – 1864, dan perubahan pada periode 1884 – 1906 akan lebih cepat dari perubahan pada periode 1864 – 1884. Percepatan perubahan pada periode 1884 – 1906 terjadi – selain disebabkan oleh faktor-faktor yang telah ada pada periode sebelumnya – akibat munculnya dua faktor pendorong percepatan perubahan. Pertama, transportasi kereta api (faktor teknologi). Kedua, potensi sumber daya manusia, yaitu pihak swasta asing (pengusaha besar dan lembaga sosial). Di antara kedua faktor itu, transportasi kereta api yang syarat dengan unsur teknologi merupakan faktor penting pendorong percepatan perubahan (Smelser, 1981 : 457, 463).

Dalam perubahan yang dilandasi oleh fungsi kota dan fungsi unsur-unsur lain, terjadi pula perubahan struktur, karena perubahan struktur tidak dapat terjadi tanpa perubahan fungsi. Dalam kehidupan masyarakat, perubahan struktur lebih banyak ditunjukkan oleh perubahan fungsi daripada oleh perubahan yang langsung terlihat (Spencer dalam Etzioni dan Eva Etzioni, eds., 1964 : 13).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan aspek kekuasaan dengan aspek fisik kota dan sosial ekonomi, serta interaksi antara kedua aspek yang disebut terakhir, merupakan pola dasar perubahan, khususnya pada periode 1810 – 1864 dan periode 1864 – 1884. Pada periode 1884 – 1906 pola perubahan berubah karena keberadaan faktor penting pendorong perubahan.

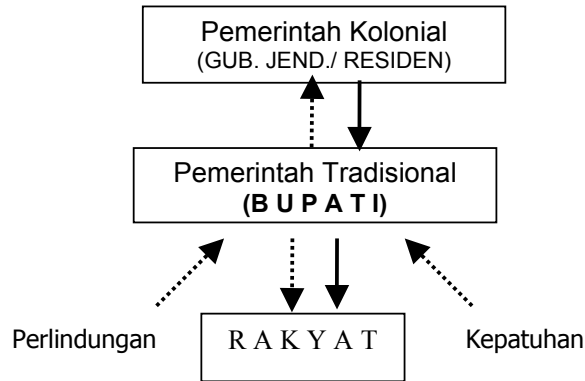
Telah disebutkan bahwa perubahan berasal dari kekuasaan bupati dan kekuasaan gubernur jenderal/residen. Secara politis, dalam struktur pemerintahan kolonial, bupati adalah objek kekuasaan gubernur jenderal/residen (subjek kekuasaan). Namun demikian, bupati tetap memiliki kekuasaan/otoritas, paling tidak dalam kedudukan sebagai pemimpin tradisional, karena

¹⁾ Sifat pengaruh kekuasaan yang dimaksud adalah kuat atau lemahnya pengaruh kekuasaan terhadap aspek-aspek yang berubah.

kepemimpinan tradisional bupati berakar pada struktur sosial berdasarkan unsur kelahiran, kekayaan, dan status sosial (Kartodirdjo, 1982 : 226). Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana proses perubahan berlangsung, maka hubungan kekuasaan gubernur jenderal/residen dengan kekuasaan bupati, serta kedudukan (posisi) dan peranan bupati dalam proses perubahan, perlu dijelaskan. Masalahnya, kekuasaan adalah refleksi dari kedudukan dan peranan merupakan manifestasi dari kedudukan dan kekuasaan. Untuk menjelaskan hal tersebut, digunakan pendekatan-an sosiologi-politik.

Kuatnya pengaruh kekuasaan/otoritas bupati terhadap rakyat, merupakan faktor dasar penyebab kegagalan pemerintah kolonial melaksanakan sistem pemerintahan langsung (*direct rule*). Akibat kegagalan itu, pengaruh kekuasaan pemerintah kolonial (khususnya gubernur jenderal/residen) hanya sampai pada bupati, sehingga bupati berperan sebagai perantara (*middleman*) yang menghubungkan kepentingan pemerintah kolonial terhadap rakyat. Namun demikian, bupati tetap merupakan objek kekuasaan pemerintah kolonial, yang berarti hubungan kedua belah pihak bersifat tidak seimbang, karena kedudukan masing-masing dalam struktur pemerintahan memang berbeda.

Akibat pemerintah kolonial gagal menjalankan sistem pemerintahan langsung, maka dalam hubungan kepentingan antara pemerintah kolonial dengan bupati dan rakyat, terjadi ketergantungan antara satu pihak pada pihak lain. Berhasil-tidaknya kehendak atau tujuan pemerintah kolonial, sangat tergantung pada bupati. Sebaliknya, nasib bupati banyak tergantung pada kebijakan pemerintah kolonial. Pada sisi lain, berhasil-tidaknya bupati merealisasikan kebijakan/kehendak pemerintah kolonial, tergantung pada rakyat. Sementara itu, kehidupan rakyat banyak tergantung pada kebijaksanaan/kepemimpinan bupati.



Keterangan : —————> Hubungan kekuasaan/otoritas (pengaruh)
.....> Hubungan kepentingan/kewajiban

Posisi bupati dalam hubungan tersebut memungkinkan ia berperan sebagai "agent of change". Dalam hubungan kekuasaan dan kepentingan yang bersifat saling ketergantungan itulah proses perubahan sosial di Bandung berlangsung.

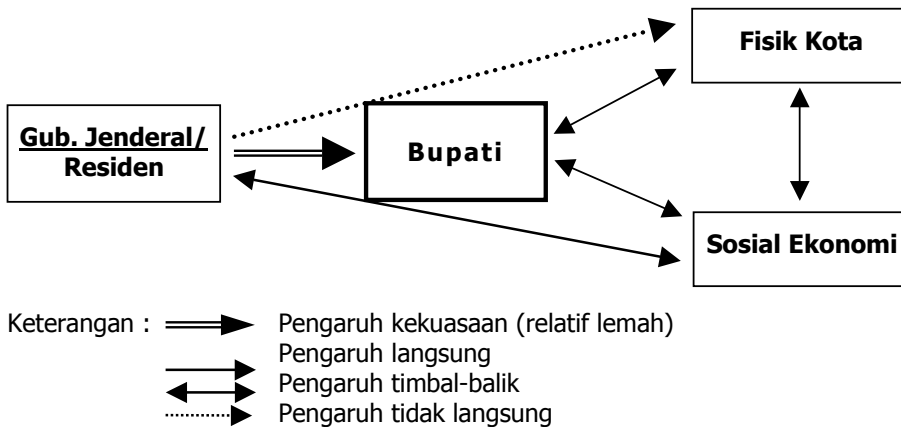
TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemikiran teoretis dan pendekatan yang digunakan, pada dasarnya perubahan sosial di Bandung berasal dari aspek kekuasaan yang berasal dari dua sumber. Pertama, kekuasaan pemerintah tradisional (kabupaten) yang otoritasnya dipegang oleh bupati. Kedua, kekuasaan pemerintah kolonial yang otoritasnya dipegang oleh gubernur jenderal dan/atau residen. Akan tetapi, sifat dan efektivitas pengaruh kekuasaan masing-masing pejabat terhadap aspek-aspek yang berubah, juga tidak sama. Ketika kota Bandung hanya berfungsi sebagai ibukota kabupaten (1810 – 1864), perubahan berasal dari dominasi kekuasaan bupati -- langsung dan tidak langsung – ditunjang oleh pengaruh kekuasaan gubernur jenderal/residen. Akan tetapi, perubahan berjalan lambat. Hal itu disebabkan oleh keberadaan faktor-faktor penghambat dan sifat pengaruh kekuasaan terhadap perubahan. Faktor utama penghambat perubahan adalah kondisi kota dan lingkungannya belum menunjang. Akibatnya pengaruh kekuasaan bupati terhadap perubahan menjadi kurang efektif. Sementara itu, gubernur jenderal/residen – meskipun sebagai subjek kekuasaan – pengaruh kekuasaannya di Bandung waktu itu relatif lemah, karena kedua pejabat itu berada di tempat yang jauh dari objek kekuasaan dan belum ditunjang oleh sarana komunikasi. Kedua pejabat itu masing-masing berkedudukan di Jakarta (Batavia) dan di Cianjur (ibukota Keresidenan Priangan). Kondisi yang disebut

terakhir menyebabkan dalam bidang tertentu bupati berpeluang untuk berperan sebagai "pelopor perubahan".

Perubahan di Bandung berawal dari peresmian berdirinya kota. Dengan kata lain, perubahan pertama kali terjadi pada fisik kota. Perlu dikemukakan, bahwa dalam pemahaman umum, kota Bandung didirikan oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels tahun 1810. Hasil penelitian penulis sampai pada simpulan, bahwa kota Bandung didirikan oleh dan atas kehendak (kebijakan) Bupati Bandung ke-6, R.A. Wiranatakusumah II (1794 – 1829). Akan tetapi proses pendiriannya dipercepat oleh perintah Daendels. Demikian pula peresmian kota itu dilakukan oleh Daendels dengan surat keputusan (*besluit*) tanggal 25 September 1810. Hal itu berarti tanggal tersebut dapat dianggap sebagai "Hari Jadi Kota Bandung".

Keberadaan faktor-faktor penghambat dan pengaruh kekuasaan terhadap perubahan kurang efektif/lemah, menyebabkan kota Bandung pada periode 1810 – 1864 cenderung masih dalam kondisi kota tradisional. Gambaran pola perubahan pada periode itu adalah sebagai berikut.



Unsur dalam kotak bergaris tebal adalah dominasi pengaruh

Sejak kota Bandung menjadi ibukota Keresidenan Priangan (pertengahan tahun 1864), kekuasaan atas kota itu beralih dari bupati kepada residen. Kekuasaan formal bupati menjadi menurun. Namun demikian, bupati tetap menjalankan pemerintahan kabupaten, dengan otoritas yang dimilikinya. Terjadinya "dualisme pemerintahan" dengan dominasi kekuasaan berada pada residen, menyebabkan faktor kendala menjadi berkurang.

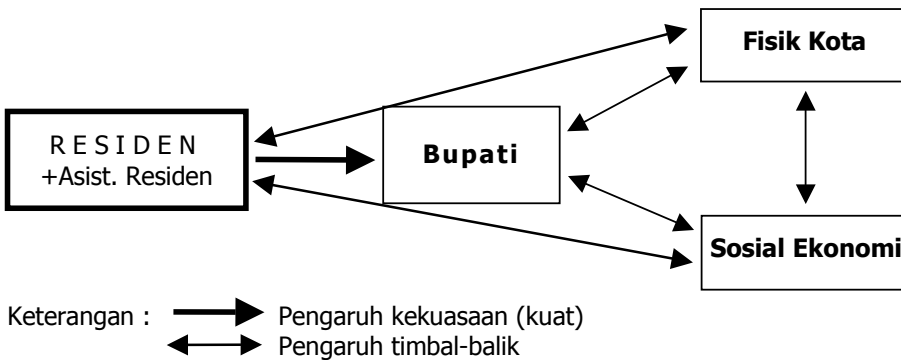
Oleh karena proses perubahan berlangsung dalam hubungan saling ketergantungan antara kekuasaan dan kepentingan pemerintah kolonial (residen) dengan pemerintah tradisional (bupati) dan rakyat, maka dalam perubahan yang berasal dari kekuasaan pemerintah kolonial, sejak waktu itu bupati berperan

Perubahan Sosial di Bandung 1810 – 1906 (A. Sobana Hardjasaputra)

sebagai "agent of change". Akan tetapi bukan agen dalam pengertian "antek kolonial pemeras rakyat" – seperti penilaian umum terhadap peran bupati pada masa kolonial – melainkan sebagai agen kolonial yang tetap berpihak kepada rakyat, sehingga perubahan itu banyak menimbulkan dampak positif bagi kehidupan rakyat Bandung. Dalam kapasitas sebagai kepala daerah/pemimpin tradisional, bupati berperan sebagai inovator perubahan bidang tertentu yang langsung menyangkut kepentingan rakyat.

Sejalan dengan perkembangan pemerintahan yang memerlukan banyak tenaga pribumi terdidik, sejak paruh kedua tahun 1866, kota Bandung menjadi pusat pendidikan pribumi di Priangan khususnya dan Jawa Barat umumnya. Hal itu terjadi sejak pembukaan sekolah pendidikan calon guru, yakni HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) pada pertengahan tahun 1866. Dalam proses perubahan, lembaga pendidikan itu merupakan salah satu "channel of change". Dalam bidang ekonomi, kota Bandung juga menjadi pusat produksi perkebunan (kopi, kina, teh, dan lain-lain) dan pertanian rakyat, khususnya di Priangan. Hal itu terutama terjadi sejak pem-berlakuan Undang-Undang Agraria (*Agrarischewet*) tahun 1870 dan Reorganisasi Priangan (*Preanger Reorganisatie*) tahun 1871.

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan perubahan di Bandung antara pertengahan tahun 1864 sampai dengan pertengahan tahun 1884 relatif cepat bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Proses perubahan pada periode tersebut berlangsung dengan pola sebagai berikut.



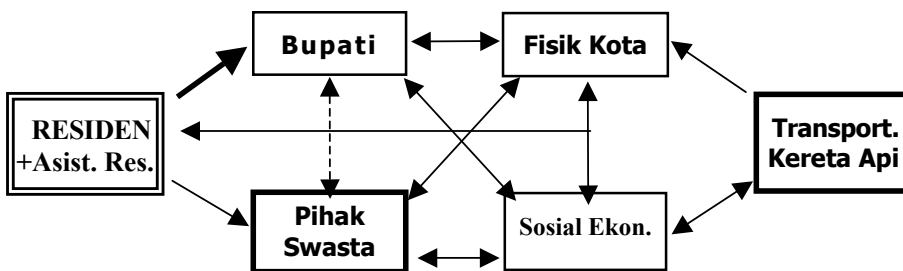
Unsur dalam kotak bergaris tebal adalah dominasi pengaruh.

Perkembangan produksi perkebunan di daerah Priangan khususnya dan Jawa Barat umumnya, mendorong pemerintah kolonial membuka jalur kereta api di daerah Jawa Barat. Letak kota Bandung yang strategis di bagian tengah Jawa Barat dan memiliki fungsi penting dalam bidang pemerintahan dan sosial ekonomi, serta potensi lain yang menguntungkan pihak kolonial, menyebabkan

fungsi kota itu makin berkembang. Sejak pertengahan tahun 1884 kota Bandung menjadi pusat transportasi kereta api "Jalur Barat".

Keberadaan transportasi kereta api bukan hanya memperlancar pengangkutan hasil perkebunan, tetapi berpengaruh besar terhadap kehidupan kota Bandung, baik perkembangan fisik kota maupun sosial ekonomi. Faktor penting lain yang turut mendorong percepatan perubahan adalah eksistensi dan peranan pihak swasta asing (pengusaha besar dan lembaga sosial). Para pengusaha membangun sarana/fasilitas kota, baik untuk usaha pribadi maupun untuk kepentingan umum golongan mereka. Lembaga sosial berperan sebagai mitra pemerintah dalam upaya mengembangkan kota. Di antara kedua faktor itu, transportasi kereta api (faktor teknologi) adalah faktor penting utama pendorong percepatan perubahan.

Keberadaan kedua faktor tersebut, menyebabkan pola perubahan menjadi kompleks. Oleh karena itu, proses perubahan pada periode 1884-1906 (Bab IV) berlangsung lebih cepat dari periode sebelumnya, dengan gambaran pola perubahan sebagai berikut.



Keterangan :

- Pengaruh kekuasaan (kuat)
- Pengaruh langsung
- Pengaruh timbal-balik
- Hubungan sosial

Unsur dalam kotak bergaris dua adalah dominasi pengaruh kekuasaan

Unsur dalam kotak bergaris tebal adalah faktor penting pendorong perubahan

Uraian tersebut mengandung kesimpulan, bahwa perubahan sosial di kota Bandung pada periode 1810 – 1906 merupakan hasil interaksi banyak faktor. Proses perubahan berlangsung dalam hubungan tiga pihak, yaitu pemerintah kolonial, pemerintah tradisional, dan rakyat yang bersifat saling ketergantungan. Walaupun perubahan pada umumnya berasal dari kekuasaan pemerintah kolonial, tetapi tidak menimbulkan konflik kepentingan, sehingga perubahan itu membawa hasil positif, baik bagi pihak kolonial maupun bagi penduduk pribumi pada umumnya. Hal itu merupakan faktor yang menyebabkan di Bandung,

khususnya pada abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, tidak terjadi kasus gerakan perlawanan rakyat, baik terhadap pemerintah kolonial maupun terhadap pemerintah tradisional, seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.

Dilihat dari sifatnya, perubahan berlangsung dalam tiga tahap/periode, masing-masing dengan sifat perubahan yang berbeda. Tahap pertama (1810 – 1864), perubahan berlangsung lambat. Tahap kedua (1864 – 1884), perubahan berlangsung relatif cepat dari tahap pertama. Tahap ketiga (1884 – 1906), perubahan berlangsung makin cepat. Faktor dasar penyebab perbedaan sifat perubahan tiap tahap adalah fungsi kota dan sifat pengaruh kekuasaan terhadap perubahan. Apabila sifat perubahan tiap tahap dihubungkan dengan arah perubahannya, perubahan sosial di kota Bandung pada periode 1810 – 1906 bergerak secara unilinear, dari kehidupan tradisional kemudian berkembang ke arah kehidupan modern. Proses perubahan mencapai puncak dengan pembentukan Gemeente Bandung (1 April 1906).

PENUTUP

Dilihat dari perspektif historis, perubahan di kota Bandung pada saat ini (awal abad ke-21) merupakan hasil atau kesinambungan dari perubahan pada masa sebelumnya. Dalam hal ini, pola dan proses perubahan di kota Bandung periode 1884 – 1906 relatif sama dengan pola dan proses perubahan saat ini di tempat yang sama. Perbedaan utama dan mendasar terletak pada aspek kekuasaan, sesuai dengan situasi zamannya. Pada periode tersebut, perubahan berasal dari kekuasaan residen/asisten residen (dalam kedudukan sebagai penjajah), ditunjang oleh kekuasaan/otoritas bupati (pihak terjajah). Sekarang (masa kemerdekaan) dalam sistem otonomi daerah, perubahan di kota Bandung berasal dari kekuasaan walikota ditunjang oleh kekuasaan gubernur. Penguasa pada masing-masing zaman pada dasarnya memiliki kebijakan yang sama, yaitu memajukan kota Bandung.

Berdasarkan hal tersebut, teoretis, perubahan di kota Bandung saat inipun tidak menimbulkan permasalahan/ekses, seperti pada periode tersebut. Pada waktu itu, hubungan kekuasaan dan kepentingan antara residen/asisten residen dengan bupati dan rakyat, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Sebaliknya, sekarang (di alam kemerdekaan) dalam hubungan antara penguasa dengan rakyat, justru ada kalanya timbul konflik kepentingan. Pada sisi lain, implementasi kebijakan mengenai perubahan dari penguasa sekarang, seringkali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Akibatnya dalam kehidupan di kota Bandung saat ini, banyak permasalahan -- dengan konotasi negatif -- yang dihadapi, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam usaha mengatasi permasalahan itu, kajian perubahan sosial dalam disertasi berikut ringkasannya, kiranya memiliki **kegunaan yang berimplikasi praktis-pragmatis**. Hasil kajian itu mungkin dapat digunakan oleh para pejabat pemerintah daerah dan lembaga swasta yang terlibat dalam pengelolaan kota

Bandung, sebagai alternatif untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi saat ini. Keadaan sekarang pada dasarnya adalah hasil kebijakan masa lalu. Pemikiran itu antara lain didasarkan pada salah satu makna sejarah sebagai akumulasi pengalaman manusia di masa lampau. Pengalaman itu sangat berharga untuk dipetik manfaatnya guna menghadapi/mengatasi permasalahan pada masa kini, sehingga dapat melakukan prediksi untuk menghadapi permasalahan di masa mendatang. Dalam hal ini, Mr. Sjafruddin Prawiranegara²⁾ dalam ceramah di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta tanggal 30 Juli 1975 menyatakan, bahwa "sejarah adalah pedoman untuk membangun masa depan".

BIBLIOGRAFI (Selektif)

A. Arsip dan Manuskrip

Algemeen Verslag Omtrent de Preanger Regentschappen Over 1824. Arsip Priangan, No. 24A. Bundel 4/5. Jakarta : ANRI.

Algemeen Verslag Preanger 1856. Arsip Priangan. Bundel 4/5. Jakarta : ANRI.
Besluit 7 Augustus 1864. No. 18.

Kolonien 1850-1900 (Berbagai nomor). Den Haag : ARA.

Mailrapporten 1871, No. 191 & 326. Den Haag : ARA.

"Regentschap Bandong". Algemeen Verslag over het Jaar 1824 Residentie Preanger Regentschappen. Den Haag : ARA.

Residentie Preanger Regentschappen. Statistieke Staat van Bovengemeld Regentschap Over 1835. Collectie J. van den Bosch. No. 552. Den Haag : ARA.

Sadjarah Bandung. Naskah Koleksi Pleyte, PLT. 6, P. 119. Jakarta : Perpustakaan Nasional.

Statistiek van het Regentschap Bandong 1864. Preanger. Bundel 30/6. Jakarta : ANRI.

B. Sumber Resmi Tercetak

Staatsblad van Nedelandsch Indie, 1819, 1821, 1823, 1829, 1851, 1853-1854, 1857, 1859, 1864-1867, 1870, 1871, 1903, 1905-1906. (Berbagai nomor)

Verslag van de Plegtige Opening van de Kweekschool voor Inlandsche onderwijs te Bandoeng op den 23sten Mei 1866. (1867). Batavia : Landsdrukkerij.

²⁾ Ia adalah Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia/PDRI (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949).

Verslag van den Dienst der Staatsspoorwegen op Java over het Jaar 1884-1906.
Batavia : Ogilvie, 1885-1906.

Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng, 1919. Bandoeng : Visser.

C. Buku

Almanak voor Bandoeng, 1941. 1ste deel. Bandoeng/Holland-Indie Handelsoer.

Appelbaum, Richard P. 1970. *Theories of Social Change*. Chicago : Markham Publishing Co.

Bandoeng 1906-1931; Officieele Jubileum Uitgave ter Gelegenheid van het 25 Jarig Bestaan van de Gemeente Bandoeng op 1 April 1931. 1931. Bandoeng : Vorkink.

Bottomore, T.B. 1972. *Sociology; A Guide to Problems and Literature*. London : George, Allen & Unwin.

Brugmans, I.J. 1938. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*. Batavia : Wolters.

Buys, M. 1900. *In het Hart der Preanger*. Leiden : S.C. van Doesburgh.

Cator, Wriester Jans. 1936. *The Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indie*. (Disertasi. Rijks Universiteit, Leiden). Oxford : Basil Blackwell.

Comite van Actie. 1918. *Bandoeng de stad op de hoogvlakte*. Bandoeng.

Coolsma, S. 1879, 1881. *Twalf Voorlezingen over West-Java; Het Land, de Bewoners en de Arbeid der Nederlandsche Zendingsvereniging*. Rotterdam : Sijn & Zoon.

Daendels, H.W. 1814. *Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder het Bestuur van de Gouverneur Generaal Herman Willem Daendels*. The Hague.

Doorman, J.G. 1898, 1930. *Gids voor Bandoeng, Garoet en Omstreken*. Bandoeng : Hotel Homann.

Ekadjati, Edi S. et al. 1986. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat (Sampai dengan tahun 1950)*. Bandung : Depdikbud. Proyek IDKD.

Etzioni, Amitai and Eva Etzioni. 1964. *Social Change; Sources, Patterns, and Consequences*. New York : Basic Books.

de Haan, F. 1911-1912. *Priangan; De Preanger-Regentschappen Onder het Nederlandsch Bestuur Tot 1811. Deel I-IV*. Batavia : Kolff.

- Hardjasaputra, A. Sobana. 1985. *Bupati Priangan; Kedudukan dan Peranannya Pada Abad ke-19*. Tesis. Yogyakarta : UGM.
- Kartadinata, M. 1921 (a). *Pesta Sakola Radja di Bandoeng*. Weltevreden : Commissie voor de Volks-lectuur/Bale Poestaka.
- Kartodirdjo, Sartono. 1980. *The Regents in Java as Middlemen; A Symbolic Action Approach*. Papers of the Dutch-Indonesian Historical Conference. The Netherlands.
- . 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia; Suatu Alternatif*. Jakarta : Gramedia.
- Kern, R.A. 1898. *Geschiedenis der Preanger-Regentschappen; Kort Overzicht*. Bandoeng : De Vries & Fabricius.
- de Klein, J.W. 1931. *Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn Nawerking*. Proefschrift. Leiden : Rijk Uni-versiteit.
- Kunto, Haryoto. 1984. *Wajah Bandoeng tempo doeloe*. Bandung : Granesia.
- Lubis, Nina H. 1998. *Kehidupan Kaum Ménak Priangan 1800-1942*. Bandung : Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Martanagara, R.A.A.. 1923. *Babad Raden Adipati Aria Marta Nagara Regent Pansioen di Soemedang*. Soemedang.
- Moore, Wilbert E. 1963. *Social Change*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.
- MOSVIA. 1930. *Gedenkboek MOSVIA 1879-1929*. Bandoeng.
- Raffles, T.S. 1814. *Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen onder het Bestuur van den Gouverneur Generaal Herman Willem Daendels, Rider, Leutenant-Generaal in de jaren 1808-1811*. Bijlagen, 1 ste stuk. 's-Gravenhage.
- . 1978. *The History of Java*. Vol. 1-2. Kuala Lumpur : Oxford University Press.
- Van Rees, Otto. 1867. *Overzicht van de Geschiedenis der Preanger Regentschappen*. Batavia.
- . 1928. *Korte geschiedenis der Nederlandsch-Indische Spoor-en Tramwegen*. Weltevreden : Kolff.
- Reitsma en W.H. Hoogland. 1921. *Gids voor Bandoeng en Omstreken*. Bandoeng .
- . 1926. *Bandoeng the Mountain City of the Netherlands India*. Weltevreden : Kolff.
- Roo de la Faille, P. de. 1895. *Preangerschetsen*. Batavia : Kolff.
- Soeria Nata Atmadja, R.A.A.A. 1940. *Regentenpositie*. Bandung : Nix.

Perubahan Sosial di Bandung 1810 – 1906 (A. Sobana Hardjasaputra)

Vereeniging Tot Nut van Bandoeng en Omstreken. 1898. *Reisgids voor Bandoeng en Omstreken met Garoet. Bandoeng* : De Vries & Fabricius.

Volksalmanak Soenda, 1922, 1938, 1939. Batavia : Bale Poestaka.

Wertheim, W.F. 1958. *The Indonesia Town; Study in Urban Sociology*. The Hague : W. van Hoeve.

de Wilde, A. 1830. *De Preanger-Regentschappen op Java Gelegen*. Amsterdam : Westerman.

D. Artikel/Majalah/Surat Kabar

Brand, W. 1940. "Strefteverhoudingen in de Stad Bandoeng (1)", *Koloniale Studien*, 24 ste jrg., No. 3-4 : p. 312-405.

Groot Bandoeng, 2 jrg., 11, 1 Nov. 1922. *Mooi Bandoeng*. Tahun 1933-1945, berbagai nomor.

Sastrahadiprawira, R. Memed. 1932. "Petikan Tina Sadjarah Kabupaten Bandung", *Parahiangan*, IV, No. 2, 14 Djanuari 1932.